

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi tentu sangat memerlukan peran masyarakat. Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yaitu melalui sebuah konsep Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Bentuk UKBM antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan RW/Desa/Kelurahan siaga aktif. Salah satu UKBM yang memiliki peran vital dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah Posyandu. Posyandu merupakan UKBM yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dan akses kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar demi mempercepat penurunan angka kematian maternal dan neonatal (Kemenkes RI, 2014).

Pada masa pandemi ini pelaksanaan posyandu mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/12763/2020 Tentang Panduan Operasional Upaya Kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk masyarakat Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa pembinaan dapat dilakukan secara daring, posyandu dapat berjalan sesuai aturan di daerah tersebut dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan, namun dalam hal ini jika posyandu tutup, maka dapat dilakukan dengan berkunjung ke rumah sasaran atau janji temu di fasilitas layanan kesehatan (Kemenkes RI, 2020).

Program posyandu adalah salah satu program yang dicanangkan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) disuatu daerah. Untuk mempercepat penurunan angka tersebut tentu memerlukan peran masyarakat sebagai

pengelola dan pelaksana program posyandu, karena posyandu milik masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri (Maketey, 2016). Posyandu memiliki beberapa kegiatan yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan. Kegiatan utama, mencakup kesehatan ibu dan anak, pelayanan keluarga berencana, gizi, pemberian imunisasi, serta pencegahan dan penanggulangan diare. Sedangkan untuk kegiatan tambahan, masyarakat dapat menambah kegiatan utama dengan kegiatan yang lainnya seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) (Kemenkes RI, 2014).

Pada tahun 2019 jumlah posyandu di Indonesia mencapai 296.777 posyandu yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Posyandu memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan sekaligus sebagai wadah masyarakat untuk berbagi informasi dan keterampilan dari petugas kesehatan dengan masyarakat (Profil Kesehatan Indonesia, 2019).

Peran kader sangat mempengaruhi kualitas dan perkembangan mutu pelayanan dan cakupan kegiatan posyandu. Kader posyandu adalah bagian dari anggota masyarakat yang secara sukarela, mampu dan memiliki waktu untuk selalu ikut serta dalam kegiatan posyandu (Didah, 2020). Menurut Permenkes RI, (2019) Kader posyandu merupakan orang yang dipilih dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Pembentukan kader dengan cara pengkaderan dari peran serta masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan dan bimbingan sehingga mampu memecahkan masalah dan menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai pelayanan yang optimal (Desiana, 2021).

Peran dan fungsi kader di lingkungan masyarakat dapat dikatakan sangat penting, hal ini karena berkaitan dengan keberhasilan dalam pelaksanaan posyandu. Kader memiliki fungsi yang dimulai dari tahap

perintisan, menghubungkan masyarakat dengan lembaga, melaksanakan dan mensukseskan pelayanan posyandu, dan sekaligus sebagai pembina untuk menggerakkan masyarakat agar selalu ikut serta dalam kegiatan posyandu. Kader merupakan ujung tombak keberhasilan pengelolaan kegiatan posyandu akan tetapi keberadaan kader relatif labil karena partisipasinya bersifat sukarela, sehingga tidak ada yang menjamin bahwa para kader ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik seperti yang diharapkan (Fretty,2020).

Indikator kinerja kader posyandu dapat dilihat dari kehadiran kader dalam pelaksanaan posyandu dan jumlah cakupan tingkat partisipasi masyarakat dalam membawa balita timbang ke posyandu, sebagai unit yang dekat dengan masyarakat kader diharapkan mampu menjadi partner di lingkungan sebagai agen sosial dalam memberikan motivasi pada masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar dan juga sebagai mobilisator. Kinerja kader yang baik dapat dilihat dari perannya dalam menjalankan posyandu dimulai dari sebelum kegiatan posyandu atau pada saat kegiatan posyandu dan sesudah kegiatan posyandu (Putra,2016).

Setiap kader memiliki motivasi yang berbeda dalam pelayanan posyandu dan kondisi ini berdampak pada kualitas dan mutu pelayanan posyandu. Menurut Widyastuti dalam (Sudarsono, 2010) Motivasi kader dalam melaksanakan posyandu hanya pada keinginan untuk mengisi waktu luang, sebagian lagi memiliki motivasi yang cukup rasional misalnya untuk meningkatkan derajat kesehatan dalam lingkungannya. Menurut Mangkunegara (2010) Motivasi diartikan suatu sikap dalam menghadapi situasi kerja di lingkungan organisasinya, sehingga jika individu bersikap positif terhadap situasi kerja maka akan menunjukkan motivasi kerja bagus. Situasi kerja tersebut diantaranya hubungan kerja, iklim kerja, fasilitas, kebijakan, kondisi kerja dan pola kepemimpinan.

Kurangnya motivasi kader dalam kegiatan posyandu mengakibatkan kegiatan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya (Subagiyo, 2015). Sehingga cakupan sasaran pada kegiatan posyandu rendah atau tidak

memenuhi target, kemudian menyebabkan tidak terpantaunya tumbuh kembang balita secara optimal maka dapat meningkatkan resiko Bawah Garis Merah (BGM) dan status gizi buruk balita yang berdampak terhadap daya ungkit besar dalam meningkatkan angka mortalitas dan mordibitas balita (Kemenkes, 2012).

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kemenkes RI Tahun 2021 Target indikator presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif tahun 2020 sebanyak 51% sedangkan capaian yang diperoleh data per tanggal 23 januari 2021 hanya 6%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020, capaian kinerja presentase kabupaten/ Kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif sebesar 11.76%. Hal ini menggambarkan bahwa masih ada selisih sebesar 88,24% dari target indikator yang belum terpenuhi pada tahun 2021. Namun terdapat faktor penghambat dari pencapaian indikator tersebut, hambatan tersebut dialami oleh kader posyandu, hal ini disebabkan karena masih kurangnya partisipasi kader dan masyarakat untuk menimbang balitanya ke posyandu, adanya anggapan masyarakat bahwa penimbangan balita tidak memiliki manfaat khusus terhadap kesehatan balita, dan masyarakat masih memiliki persepsi salah terhadap pemberian imunisasi di poyandu yang menganggap demam pasca imunisasi akibat suntik dapat mengganggu kesehatan anak (Kemenkes RI,2020).

Data dinas kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 memaparkan jumlah posyandu yang ada sebanyak 7.483 posyandu yang menurut jenis stratanya yaitu posyandu pratama sebanyak 0,7%, Posyandu madya 21,5 %, Posyandu Purnama sebanyak 67,5%, Posyandu Mandiri sebanyak 10,3%, sedangkan jumlah posyandu aktif sebanyak 77,8% dengan jumlah cakupan penimbangan balita sebanyak 70,9% (Profil Dinkes NTB, 2021). Sedangkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 mencatat jumlah puskesmas yang ada di lombok tengah sebanyak 28 puskesmas, jumlah posyandu yang ada sebanyak 1.697 posyandu dengan jumlah kader sebanyak 8.425 kader, sedangkan jumlah balita yang datang

ditimbang sebanyak 67,0% balita. Keberhasilan posyandu sendiri dapat dilihat dari cakupan SKDN dengan data D/S. Dimana S merupakan seluruh balita yang berada di wilayah tersebut, K yaitu balita yang memiliki KMS dan D yaitu balita yang ditimbang, N merupakan balita yang berat badannya naik. Presentase kinerja kader posyandu secara nasional yaitu sebesar 69,2% dari target 80% dan 30,8% untuk angka drop out kader pada tahun 2017. Secara keseluruhan cakupan tingkat partisipasi masyarakat di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat dan khususnya kabupaten Lombok Tengah dalam membawa balita timbang ke posyandu masih dibawah target yang seharusnya yaitu 85% (Profil Dinkes Lombok Tengah, 2021).

Dilihat dari Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Puskesmas Kuta yang terdiri dari 6 kelurahan memiliki posyandu sebanyak 71 posyandu dengan jumlah kader sebanyak 355 orang, jumlah posyandu aktif sebanyak (21,1%), cakupan pelaksanaan posyandu aktif di puskesmas kuta berada pada angka terendah dari 24 puskesmas yang ada di kabupaten lombok tengah (Profil Dinkes Lombok Tengah, 2020). Berdasarkan laporan data-data kegiatan posyandu dan keterangan dari petugas kesehatan dari 355 kader yang ada di wilayah puskesmas kuta terdapat sekitar 75% kader yang aktif (kinerja baik) dan 25% kader tidak aktif (kinerja kurang baik) dalam kegiatan posyandu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari polindes Desa Tumpak diketahui jumlah kader yang telah mendapatkan sertifikat dan pelatihan sebanyak 70%. Sedangkan presentase kehadiran kader dalam pelaksanaan posyandu balita di Desa Tumpak sebanyak 78% dengan cakupan penimbangan balita secara keseluruhan di Desa tumpak sebanyak 72% sehingga terdapat selisih 10,3% dari target seharusnya yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan RI yaitu 85%. Dari data tersebut diketahui bahwa kader belum optimal dalam mengelola kegiatan posyandu di masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Girsang dkk, (2019) Tentang Hubungan Motivasi Kader Posyandu Dengan Upaya Peningkatan Kunjungan Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pematang Silimahuta menyatakan bahwa terlihat adanya hubungan motivasi dengan peningkatan kunjungan balita, karena bisa dilihat pada kader posyandu masih memiliki motivasi yang rendah dan ini sangat berpengaruh pada kunjungan balita juga sangat rendah. Para ibu balita tidak memiliki keinginan membawa balitanya ke posyandu karena tidak ada dorongan dari para kader.

Penelitian Raniwati (2019) Tentang Studi Analisis Fakto-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kinerja Kader Dalam Kegiatan Posyandu Di Wilayah Kerja Puskesmas Anak Air Kota Padang menyatakan bahwa kinerja kader dalam pelaksanaan posyandu masih kurang baik karena dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap, motivasi, sarana dan prasarana dan pelatihan kader. Kader akan memiliki kinerja yang baik apabila didasari tingkat pengetahuan yang tinggi, sikap yang positif, pernah mengikuti pelatihan dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Penelitian Yuliana (2016) Tentang Hubungan Motivasi Dengan Kinerja Kader Posyandu Pada Posyandu Berseri Dan Posyandu Bahagia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rimba Ayu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara, dari hasil penelitian tersebut terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja kader. Dan diantara faktor yang mempengaruhi kinerja kader adalah motivasi. Kurangnya motivasi dalam kegiatan posyandu mengakibatkan kegiatan tidak berjalan secara optimal.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan September 2021 terhadap 18 posyandu yang berada di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa dalam kegiatan pelaksanaan posyandu pada masa pandemi *Covid-19* ini, pelaksanaan posyandu di Desa tumpak tetap dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan. Namun pelaksanaannya masih belum optimal dilihat dari minimnya peran masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu. Ibu hamil

maupun ibu yang memiliki anak balita enggan mengikuti kegiatan posyandu dengan berbagai alasan seperti takut keluar rumah dan takut akan tertular virus *Covid-19*. Kader yang seharusnya berperan sebagai mobilisator dan fasalikator dalam pelaksanaan posyandu pada masa pandemi ini khususnya di desa tumpak, kini tak lagi melakukan perannya dengan optimal sebagai bentuk perwujudan dari tugas dan fungsinya. Banyak dari mereka juga enggan untuk memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi saat ini dan bagaimana pelaksanaan posyandu pada masa pandemi *Covid-19*.

Dari survei lapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwa tugas pokok yang seharusnya dilaksanakan terutama pada masa pandemi ini tidak dilakukan dengan sepenuhnya. Sebelum hari buka posyandu kader melakukan tugas meliputi : (1) Menyampaikan informasi kepada beberapa ibu saja, (2) Kader tidak melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya terkait pelayanan yang akan diselenggarakan, (3) Kader bersikap pasif dan hanya mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan, (4) Kader tidak pernah menyiapkan bahan penyuluhan, Kemudian pada saat hari buka posyandu: (1) Kader hanya sesekali melakukan pengukuran lingkaran kepala anak, (2) Tidak memantau pola asuh orang tua terhadap anak, (3) Masih belum optimal dalam memantau kesehatan balita terutama bagi balita yang tinggal di wilayah terpencil.

Pada saat sesudah hari buka posyandu pada masa pandemi ini : (1) Kader tidak pernah melakukan kunjungan rumah pada balita yang tidak hadir pada hari buka posyandu dan anak yang mengalami kurang gizi, (2) Melakukan pertemuan dengan ibu PKK untuk membahas kegiatan posyandu dan kegiatan lainnya sangat jarang sekali dilakukan. Hasil survei menunjukkan bahwa jumlah kader yang ada di Desa Tumpak secara keseluruhan berjumlah 45 orang kader, akan tetapi kader yang ada saat ini belum sepenuhnya melakukan tugas dan fungsinya sesuai pedoman pelaksanaan posyandu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan desa setempat dan kepala desa tumpak, saat ini kader yang ada di wilayah desa tumpak mengalami penurunan fungsi dan kinerja hal ini karena sebagian kader hadir hanya untuk mengisi absen dan berkumpul dengan ibu-ibu balita lainnya karena tidak paham dengan tugasnya selain mencatat dan menimbang bayi. Menurut bidan desa yang ada di wilayah desa tumpak, kinerja kader yang kurang baik tentu akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan posyandu seperti tidak efektifnya kegiatan posyandu yang seharusnya dilakukan dengan “Pola Lima Meja” tidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan kader hanya mengerjakan tugas pada meja satu sampai meja tiga yaitu pendaftaran, penimbangan, dan pencatatan pada KMS.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Motivasi Kader Kesehatan dalam Pelaksanaan Posyandu Balita di Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Motivasi Kader Kesehatan dalam Pelaksanaan Posyandu Balita di Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1.1 Tujuan Umum

Menggambarkan Motivasi Kader Kesehatan dalam Pelaksanaan Posyandu Balita di Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

1.2 Tujuan Khusus

a. Menggambarkan Motivasi Intrinsik Kader Kesehatan dalam Pelaksanaan Posyandu Balita di Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

- b. Menggambarkan Motivasi Ekstrinsik Kader Kesehatan Dalam Pelaksanaan Posyandu Balita di Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

D. Manfaat Penelitian

1.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan ilmiah dan informasi tambahan khususnya mengenai pemanfaatan program posyandu secara optimal sebagai salah satu upaya kesehatan masyarakat berbasis dari, oleh dan untuk masyarakat.

2.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi atau refrensi peneliti berikutnya dan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya khususnya berkaitan tentang keaktifan kader posyandu serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan khususnya tentang kinerja kader dipelayanan posyandu.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi pendidikan khususnya dalam bidang kepustakaan sebagai sumber kajian terkait dengan penelitian.

c. Bagi Dinas Kesehatan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka penentuan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat khususnya dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat guna meningkatkan aktivitas dan kinerja kader di Kabupaten Lombok Tengah.

d. Bagi Puskesmas

Dapat memberikan masukan tentang kinerja kader di Puskesmas dan memberikan gambaran pada pembinaan kader posyandu.

e. Bagi Posyandu

Dapat memberikan masukan kepada kader posyandu agar dapat menjalankan tugas-tugas kader lebih baik kedepannya.